

BAB IV
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP ANAK
TERLANTAR

A. Efektivitas Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

1. Realisasi Hak–Hak Dasar Yang Melekat Pada Anak

Hak-hak anak diatur dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional, dengan tujuan utama untuk melindungi kesejahteraan dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Salah satu landasan utama perlindungan hak anak di tingkat internasional adalah Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini mengatur hak-hak dasar anak, termasuk hak hidup, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Indonesia meratifikasi CRC pada tahun 1990, menjadikannya pedoman utama bagi negara dalam memastikan hak-hak anak terlindungi.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang mencakup berbagai dimensi kehidupan anak, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu prinsip dasar CRC adalah non-diskriminasi, yang menjamin semua anak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial, berhak mendapatkan hak yang sama. Selain itu, terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar bagi setiap keputusan yang melibatkan anak di tingkat global.

Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang ini mencakup hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak atas identitas, hak pendidikan, serta hak atas layanan kesehatan yang layak.

Selain itu, Undang-Undang ini juga melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, pekerja anak, serta penyalahgunaan narkoba. Namun, dengan semakin berkembangnya tantangan dalam perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai pembaruan untuk mengatasi isu-isu baru yang muncul.

Pembaruan Undang-Undang ini memperkuat perlindungan anak, dengan menambah aspek pencegahan kekerasan, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Undang-Undang ini juga memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak anak yang terlantar atau dalam situasi darurat, seperti anak yang menjadi korban bencana alam atau kekerasan.

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk menyediakan perawatan dan perlindungan yang sesuai, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi anak-anak yang terabaikan. Dalam hal ini, Dinas Sosial di setiap daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan tersebut. Di tingkat lokal, Indonesia juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan hak anak.

Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum tambahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam melindungi anak-anak. Misalnya, Perda Perlindungan Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menetapkan pedoman tentang fasilitas perlindungan anak, dukungan psikososial, dan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau pengabaian.

Selain itu, peraturan tentang akses pendidikan bagi anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin atau memiliki kebutuhan khusus, juga menjadi bagian penting dari perlindungan hak anak. Misalnya, peraturan yang mengatur bantuan pendidikan memastikan anak-

anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengakses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur hak anak, tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan hukum tersebut masih tetap ada. Banyak anak yang masih kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam pendidikan, perlindungan dari kekerasan, maupun akses layanan kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lain untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melaksanakan berbagai langkah untuk memastikan hak-hak dasar anak terlaksana dengan baik, terutama bagi anak-anak yang terlantar atau membutuhkan perlindungan. Salah satu langkahnya adalah memastikan anak-anak memiliki dokumen identitas yang sah, seperti akta kelahiran. Dinas Sosial juga memastikan anak-anak mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan imunisasi.

Selain itu, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak terlantar, baik melalui sekolah formal maupun program pendidikan alternatif. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi menjadi fokus utama, dimana Dinas Sosial menyediakan tempat penampungan sementara dan pendampingan hukum.

Dinas Sosial juga menyediakan tempat tinggal yang aman bagi anak-anak yang membutuhkan, serta memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, Dinas sosial memberikan pendampingan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum dan bekerjasama dengan keluarga serta masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap hak-hak anak.

Untuk anak-anak yang mengalami trauma, Dinas Sosial menawarkan layanan pemulihan psikososial seperti konseling dan terapi. Dinas Sosial juga secara aktif melakukan sosialisasi tentang hak anak kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas Sosial berperan besar dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak di Kota Tangerang Selatan.

Teori efektivitas hukum berhubungan langsung dengan sejauh mana pelaksanaan perlindungan hak anak yang diatur oleh peraturan internasional dan nasional dapat mencapai hasil yang diinginkan. Keberhasilan dapat dilihat dari apakah kebijakan tersebut berhasil memenuhi hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam hal ini, efektivitas Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tercermin dari upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, layanan pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan.

Selain itu, teori efektivitas hukum juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dan pihak terkait. Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Evaluasi dan pemantauan program perlindungan anak sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif, serta untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan.

Masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung hak-hak anak, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan tersebut. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat untuk memastikan perlindungan anak berjalan dengan optimal.

2. Efektivitas Penanganan Terhadap Anak Terlantar di Dinas Sosial Tangerang Selatan

Penanganan anak terlantar yang efektif di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sangat penting untuk memastikan hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik. Anak-anak terlantar seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi perkembangan mereka, seperti keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Oleh karena itu, upaya Dinas Sosial untuk menangani anak-anak terlantar bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah tersebut dan menjamin anak-anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak.

Salah satu aspek utama dalam penanganan anak terlantar adalah penyediaan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menyediakan rumah perlindungan atau panti sosial yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi anak-anak terlantar. Fasilitas tempat tinggal ini harus memadai dan aman, serta dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur yang nyaman, sanitasi yang bersih, dan perlengkapan sehari-hari. Tempat tinggal yang layak akan memberikan rasa aman bagi anak-anak dan sangat penting untuk proses pemulihan fisik dan emosional mereka. Keberhasilan tempat tinggal ini bisa dilihat dari bagaimana anak-anak merasa aman dan mampu pulih serta berkembang dalam lingkungan tersebut.

Selain penyediaan tempat tinggal, akses pendidikan yang layak juga menjadi prioritas. Dinas Sosial memastikan anak-anak terlantar dapat mengakses pendidikan yang memadai, baik melalui sekolah formal maupun alternatif. Dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial menyediakan berbagai program yang memastikan anak-anak terlantar tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar. Bagi anak-anak yang mengalami kesulitan mengikuti pendidikan formal, program pendidikan non-formal atau pelatihan keterampilan disediakan. Keberhasilan dalam memberikan pendidikan yang layak dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang

melanjutkan pendidikan dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat di masa depan.

Pendidikan, layanan kesehatan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan anak. Anak-anak terlantar seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang dapat mendukung perkembangan mereka. Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, serta perawatan medis bagi anak-anak yang membutuhkan. Layanan ini juga mencakup pemantauan tumbuh kembang anak untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Keberhasilan layanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan kesehatan anak-anak setelah menerima perawatan dan seberapa banyak anak-anak yang terhindar dari penyakit serius.

Aspek fisik, pemulihan psikososial anak-anak terlantar juga sangat penting. Banyak anak terlantar yang mengalami trauma akibat kekerasan atau kehilangan orang tua. Oleh karena itu, pemulihan psikososial mereka melalui layanan konseling dan terapi menjadi bagian penting dari penanganan mereka. Dinas Sosial menyediakan berbagai layanan untuk mendukung anak-anak ini, membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri. Efektivitas pemulihan ini bisa diukur dari sejauh mana anak-anak dapat mengatasi trauma mereka dan kembali berfungsi dalam kehidupan sosial mereka.

Perlindungan hukum juga menjadi perhatian utama dalam penanganan anak terlantar. Anak-anak terlantar yang terlibat dalam masalah hukum memerlukan pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan pengacara untuk memberikan pendampingan yang memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum. Keberhasilan perlindungan hukum dapat diukur dari sejauh mana anak-anak terlantar mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka dipenuhi selama proses hukum.

Selain penanganan langsung, pencegahan kekerasan terhadap anak-anak terlantar juga menjadi perhatian utama. Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada penanganan anak yang sudah terlantar, tetapi juga berusaha mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Melalui program pelatihan untuk petugas sosial dan kampanye kesadaran di masyarakat, Dinas Sosial berupaya mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam melaporkan kasus kekerasan dan pengabaian. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari berkurangnya angka kekerasan terhadap anak-anak terlantar.

Dinas Sosial juga aktif dalam mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera. Dengan sistem pelaporan yang baik, Dinas Sosial dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani anak-anak terlantar dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Kerjasama dengan lembaga lain, termasuk masyarakat dan organisasi swadaya, juga sangat penting untuk mendukung upaya penanganan anak terlantar. Semakin baik identifikasi kasus anak terlantar, semakin cepat mereka dapat memperoleh bantuan yang diperlukan.

Evaluasi dan pemantauan yang rutin terhadap semua program penanganan anak terlantar sangat diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dinas Sosial perlu memastikan bahwa program-program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi anak-anak. Evaluasi ini juga memungkinkan Dinas Sosial untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program dan melakukan perbaikan. Program yang berhasil dapat dilihat dari dampak positif yang diterima oleh anak-anak terlantar setelah menerima bantuan, seperti perbaikan dalam kesehatan, pendidikan, dan pemulihan psikososial.

Program-program yang melibatkan berbagai layanan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan psikososial memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pengelolaan

anggaran yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program berjalan lancar. Pengalokasian anggaran yang tepat sangat penting agar anak-anak terlantar dapat memperoleh bantuan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dinas Sosial perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas sosial agar dapat menangani kasus anak terlantar dengan lebih baik. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai hak-hak anak, penanganan trauma, dan prosedur hukum yang berlaku akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Petugas yang terlatih dengan baik dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak terlantar.

Secara keseluruhan, efektivitas penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti akses ke tempat tinggal yang aman, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan hukum yang tepat, dan pemulihan psikososial yang berhasil. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

B. Strategi Pencegahan Yang Dilakukan Dinas Sosial Terhadap Anak Terlantar

Dinas Sosial Tangerang Selatan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam mengelola dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memiliki peran dan tanggung jawab untuk menangani berbagai permasalahan sosial, salah satunya anak terlantar. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berfokus pada penanganan masalah sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan berbagai pendekatan pencegahan untuk mengurangi angka anak terlantar, yang melibatkan kolaborasi dengan masyarakat dan keluarga. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta potensi risiko pengabaian atau kekerasan yang dapat menyebabkan anak-anak terlantar. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan terlibat dalam perlindungan anak.

Selain itu, pemberdayaan keluarga menjadi fokus utama dalam pencegahan anak terlantar. Dinas Sosial memberikan pelatihan kepada keluarga, khususnya yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang rentan, untuk mengajarkan pola asuh yang baik dan pentingnya perhatian terhadap anak. Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk membantu mengurangi beban ekonomi mereka, sehingga dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka.

Dinas Sosial juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan yang layak. Melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan, Dinas Sosial berupaya untuk mencegah anak-anak putus sekolah dan mendorong mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan, sehingga mengurangi risiko mereka menjadi terlantar.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga berisiko mendapatkan akses pendidikan yang baik. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga memberikan pendampingan untuk mengidentifikasi anak-anak yang terancam tidak bersekolah, dan segera memberikan solusi agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang memadai.

Dinas Sosial juga menaruh perhatian besar pada pencegahan kekerasan dalam keluarga, yang sering menjadi penyebab utama anak terlantar. Bersama dengan lembaga hukum dan organisasi lainnya, Dinas Sosial melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kekerasan terhadap anak dan cara-cara untuk mencegahnya. Melalui kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi menyebabkan anak-anak terlantar.

Selain itu, Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap keluarga yang berada dalam kesulitan sosial atau ekonomi, dengan tujuan mendeteksi masalah sejak dini sebelum anak-anak terjebak dalam situasi yang mengarah pada pengabaian. Program deteksi dini ini memungkinkan Dinas Sosial untuk memberikan intervensi yang cepat dan tepat guna mengatasi masalah keluarga yang dapat berisiko menyebabkan anak terlantar.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, Dinas Sosial juga memberikan pelatihan kepada petugas sosial agar mereka lebih terampil dalam mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi anak-anak. Para petugas sosial dilatih untuk memberikan pendampingan yang tepat bagi keluarga yang membutuhkan bantuan, serta mengarahkan mereka ke layanan yang sesuai, baik itu layanan kesehatan, pendidikan, atau psikososial.

Dinas Sosial juga membentuk jaringan masyarakat peduli anak, yang melibatkan warga dalam upaya pemantauan dan perlindungan anak-anak. Dengan adanya jaringan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan melaporkan situasi yang memerlukan perhatian dari Dinas Sosial.

Penerapan teknologi juga turut berperan dalam strategi pencegahan. Dinas Sosial memanfaatkan sistem informasi untuk memonitor keluarga berisiko tinggi dan anak-anak yang memerlukan perlindungan. Teknologi ini memungkinkan Dinas Sosial untuk lebih cepat menanggapi kasus-kasus yang berpotensi membahayakan anak-anak, sehingga tindakan preventif bisa dilakukan lebih awal.

Sebagai langkah terakhir, Dinas Sosial juga memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka. Program ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan tentang hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta perlindungan dari keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, anak-anak juga dapat berperan dalam pencegahan anak terlantar dengan mengidentifikasi potensi ancaman bagi diri mereka atau teman-teman mereka.

Secara keseluruhan, berbagai pendekatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun lembaga lainnya, Dinas Sosial berusaha memastikan anak-anak terlindungi dan dapat tumbuh dalam kondisi yang aman dan sejahtera.

Peraturan-peraturan yang berlaku mengatur berbagai aspek dalam perancangan dan penanganan anak terlantar, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu dasar hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan kepada anak, termasuk menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk anak terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011 juga mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan fokus pada penyediaan layanan sosial dan rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 memberikan pedoman tentang pelaksanaan layanan sosial untuk anak, yang mencakup penampungan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikososial, khususnya bagi anak-anak yang terlantar. Di tingkat daerah, banyak Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan anak secara lebih spesifik, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lokal.

Dinas Sosial juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langkah-langkah dalam penanganan anak terlantar, mulai dari identifikasi hingga pemberian layanan yang dibutuhkan. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA) juga menyusun strategi perlindungan anak secara menyeluruh, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menangani anak terlantar.

Dengan adanya berbagai peraturan ini, Dinas Sosial memiliki landasan hukum yang jelas dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan anak terlantar, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. Hasil Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Terhadap Anak Terlantar

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak H. Rouf, S.E., bahwa efektivitas dalam perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang berada di kota Tangerang Selatan belum cukup baik. Dalam hal ini narasumber belum mampu untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan strategi maupun program yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai anak terlantar.

Tidak ada program khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi anak terlantar, hanya saja menyediakan 'Rumah Singgah' sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menampung bayi, anak, orang tua, bahkan disabilitas yang terlantar. Biasanya, bayi yang terlantar terlebih dahulu diperiksa ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui kondisi fisiknya, kemudian diserahkan kepada panti untuk ditampung.

Selain menyediakan 'Rumah Singgah', upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar dengan melaksanakan kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya keluarga dan kelompok yang rentan untuk

melakukan pelantaran terhadap anak, dengan menghimbau kepada masyarakat bahwa dengan melakukan penelantaran berarti akan memicu permasalahan sosial, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat dianggap mampu memberi pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat, sehingga dapat mengurangi anak terlantar angka anak terlantar yang ada di kota Tangerang Selatan. Menurut narasumber melalui sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, menjadikan masyarakat paham akan pentingnya untuk tidak melakukan pelantaran anak akan mendapatkan konsekuensi hukum sejalan dengan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat.

